

Plus Minus Jurnalisme Multiplatform

Masriadi

Perilaku Komunikasi Etnis India Dalam Komunikasi Antar Budaya

Cut Alma Nurafiah

Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Model Komunikasi Pembelajaran Pada Homeschooling Komunitas Kak Seto Wilayah Kota Medan

Natasia Simangunsong

Konstruksi Realitas Dalam Media Massa

Kamaruddin

Internalisasi Nilai-nilai Normatif Umat Islam Terhadap Praktik Korupsi Pada Sektor Pelayanan Publik

Awaluddin Arifin

Industri Media Di Pakistan Dan India

Cindenia Puspasari Dan Nur Hidayah

Sistem Komunikasi Indonesia: analisis Peran Opinion Leader Di Pedesaan

Ainol Mardhiah

A Nation Images Of China In The Media During Olympic Games In 2008

Dwi Fitri

Aplikasi Peran Public Relations Pt.pupuk Iskandar Muda Melalui Two Ways Symmetric Communications

Putri Mauliza



universitas
MALIKUSSALEH
The Blessing University

Jurnal
JURNALISME

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Vol.1 No.1 Edisi April 2016

Alamat:

Program Studi Ilmu Komunikasi
Jln. Sumatera No.2 Kampus Bukit Indah
Lhokseumawe - Aceh
<http://komunikasi.unimal.ac.id/>
<Http://www.unimal.ac.id/>
e-mail: jurnalisme.kom@gmail.com

Terbit 2 kali setahun

Jurnal JURNALISME
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

- Penasehat : Rektor Universitas Malikussaleh
Pengaruh : M.Akmal, S.Sos.,MA
Penanggung Jawab : Kamaruddin, S.Sos.,M.Si
Pemimpin Redaksi : Masriadi, S.Sos, M.Kom.I
Sekretaris Redaksi : Awaluddin Arifin, S.Sos.,M.lkom
Bendahara : Muhammad Fazil, S.Ag.,M.Soc.Sc
Anggota Redaksi : Deddy Satria M, S.Sos.,M.Si
: Dwi Fitri.,MA
: Anismar, S.Ag.,M.Si
: Ade Muana Husniati, S.Sos.,M.Si
: Subhani, S.Sos.,M.Si
: Ainol Mardhiah, S.Ag.,M.Si
: Harinawati, S.Sos.,MA
: Cindenia Puspasari, S.IP.,M.Soc.Sc
: Muhammad Ali, S.Ag.,M.Si
Mitra Bestari : Prof. Dr. Engkus Kuswarno (Unpad)
: Prof. Erman Anom (U.Esa Unggul)
: Prof.Dr. Alo Liliweri, M.Si (Uversitas Nusa Cendana)
: Prof. Lusiana Andriani Lubis, Ph.D (USU)
: Prof. Dr. Ahmad Shihabuddin (Untirta)
: Dr. Juara P.Lubis (Institut Pertanian Bogor)
: Dr. Heri Budiarto (Univeristas MercuBuana Yogyakarta)
: Dr. Tumomo Rahardjo (Universitas Diponegoro)
: Dr.A.Rani Usman, M.Si (UIN Arraniry)
: Dr. Hamdani M.Syam (Unsyiah)
: Dr. Irwansyah, MA (UI)
: Dr. H.Hamdani, AG., MA (IAIN Malikussaleh)
Setting Layout : Awaluddin Arifin, S.Sos.,M.lkom
Promosi dan Distribusi : Firi Hanum, SE. Rosna Dewi, S.Sos

Alamat Redaksi

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP - Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Jln. Sumatera No.2 Kampus Bukit Indah
Lhokseumawe - Aceh,
<http://komunikasi.unimal.ac.id/> [Http://www.unimal.ac.id](http://www.unimal.ac.id)
E-mail: jurnalisme.kom@gmail.com

DAFTAR ISI
Volume I No. 1 Edisi April 2016

	Hal.
PLUS MINUS JURNALISME MULTIPLATFORM Masriadi	1-6
PERILAKU KOMUNIKASI ETNIS INDIA DALAM KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA Cut Alma Nurafiah ,	7-30
STUDI DESKRPTIF KUALITATIF MENGENAI MODEL KOMUNIKASI PEMBELAJARAN PADA <i>HOMESCHOOLING</i> KOMUNITAS KAK SETO WILAYAH KOTA MEDAN Natasia Simangunsong ,	31-72
KONSTRUKSI REALITAS Dalam MEDIA MASSA Kamaruddin ,	73-96
INTERNALISASI NILAI-NILAI NORMATIF UMAT ISLAM TERHADAP PRAKTIK KORUPSI PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK Awaluddin Arifin	97-102
INDUSTRI MEDIA DI PAKISTAN DAN INDIA Cindenia Puspasari dan Nur Hidayah ,	103-112
SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA:ANALISIS PERAN <i>OPINION LEADER</i> DI PEDESAAN Ainol Mardhiah ,	113-122
A NATION IMAGES OF CHINA IN THE MEDIA DURING OLYMPIC GAMES IN 2008 Dwi Fitri ,	123 -140
APLIKASI PERAN <i>PUBLIC RELATIONS</i> PT.PUPUK ISKANDAR MUDA MELALUI <i>TWO WAYS SYMMETRIC COMMUNICATIONS</i> Putri Mauliza , Pembimbing: Ade Muana Husniati dan Subhani	141-152
Biodata Penulis	153-155

INDUSTRI MEDIA DI PAKISTAN DAN INDIA

Oleh :

Cindenia Puspasari¹ dan Nur Hidayah²

¹Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Aceh E-mail: Cindenia_ukm@yahoo.com

²Prodi Studi Media dan Komunikasi, Fakulti Sain Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

The development and strength of the media industry in each country was not the same. The social, political and economic in South Asia has become the media discourse, especially on the issue of intra-state conflicts. The purpose of this article to discuss the differences in the television media system in Pakistan and India as well as how the television media can influence the development of social, economic and political between the two countries.

Keywords - Media industry, television in Pakistan and India

PENDAHULUAN

Salah satu dampak globalisasi adalah lahirnya media global terhadap televisi sebagai perintisnya. Perkembangan dan kekuatan industri televisi di tiap negara pun tidaklah sama. Pengembangan sosial, politik dan ekonomi di Asia Selatan telah menjadi wacana media khususnya dalam isu konflik intra-negara. Wilayah ini satu dari yang paling berbeda secara etnik, budaya, dan linguistik, maupun yang paling banyak penduduknya di dunia. Namun, wilayah ini juga merupakan tuan rumah bagi permusuhan etnik secara mendalam, kekerasan penjajahan, dan banyak peperangan, yang masih menjadi banyak perhatian dunia.

Tujuan artikel ini guna membahas mengenai perbedaan sistem media televisi di wilayah Pakistan dan India serta bagaimana media televisi dapat mempengaruhi pengembangan sosial, ekonomi dan politik diantara dua negara tersebut. Wilayah Asia Selatan dalam *South Asia Association for Regional*

Cooperation (SAARC) tahun 1985, terdiri dari tujuh negara: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Dilihat secara kasuseluruhan negara-negara tersebut mencatat lebih dari satu dan seperempat miliar orang, atau hanya di bawah satu seperempat dari populasi dunia. Ukuran geografis dan demografi Asia Selatan yang curam menunjuk pada perbedaan proporsi benua intra-regional.

Bukan hanya perbedaan etnik, agama, dan linguistik saja yang terlihat, namun juga terdapat perbedaan politik di antara wilayah Asia Selatan, meskipun banyak negara-negara Asia Selatan mempunyai pengalaman yang sama sebagai negara *commonwealth*. Negara *commonwealth* merupakan satu persatuan yang melibatkan negara-negara daulat atau yang pernah di jajah oleh pihak British. Yang membedakan diantara negara-negara *commonwealth* ini diantaranya Bangladesh, India, Maldives, dan Sri Lanka merupakan negara yang menganut republik demokrasi, lalu Bhutan dan Nepal adalah pemerintah, dan seterusnya ada Pakistan yang menganut demokrasi parlemen yang berasaskan kepada Islam. Dari banyak negara-negara *commonwealth* tersebut, penulis ingin memfokuskan kepada bahasan mengenai bagaimana media mengangkat masalah-masalah konflik yang terjadi yang dapat mempengaruhi pengembangan sosial, ekonomi dan politik diantara Pakistan dan India.

Wacana etnik dan ideologi juga telah mempengaruhi perlakuan yang berbeda secara luas. Di Bangladesh, India, Maldives, dan Sri Lanka, negaranya secara formal sekular dan *non-denominasional*, meskipun beberapa referensi pada komunitas keagamaan ada di setiap kasus. Namun, di Pakistan, secara formal merupakan negara yang menganut republik Islam; dan Nepal adalah pemerintah Hindu. Masalah minoritas yang signifikan pada pengertian etnik dan keagamaan, telah direpresentasikan oleh media sebagai hubungan lintas-batas yang penting antara komunitas etnik dan keagamaan di negara-negara yang berbeda tersebut. Pengalaman politik, ideologi, identitas etnik, dan kondisi ekonomi yang berbeda juga telah digambarkan oleh media dalam kepelbagaiannya sebagai negara-negara yang sedang menghadapi tantangan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

PAKISTAN

Pakistan, negara yang mempunyai kasusan sebagai negara yang banyak terkena isu-isu terorisme dan pusat perhatian dalam perang global melawan terorisme. Negara ini dihadapkan dengan konflik internal dan kekerasan domestik berkepanjangan. Namun, setelah diadakan pemilu pada Februari 2008, Pakistan hari ini menemukan dirinya dalam tahun kedua sebagai tantangan dalam mencaapai proses demokrasi, setelah beberapa tahun militer menguasai negara ini. Perkembangan ini menandai perhubungan bersejarah dengan kasusempatan untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan. Pakistan dalam hal ini terkasusan sebagai negara yang terancam oleh krisis ekonomi dan efek dari pemberontakan.

Menurut penjelasan dalam artikel Media Asia, Pakistan sebagai negara yang sedang membangun demokrasi dalam pemerintahan dan praktiknya menyadari akan peran penting media dalam proses demokrasi terhadap masyarakatnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejumlah editorial di Pakistan sebagai kebebasan dalam perkhidmatan dan kebebasan penyiaran sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pakistan. Dengan memberikan kebebasan dalam menyampaikan suara/pendapat, sebagaimana kebebasan dalam pemilihan program dan tayangan, berita, pencarian tenaga kerja dalam dunia media dan *budgeting*. Sebagaimana dijelaskan dalam McQuails tentang keberadaan media dan khalayaknya,

"the relationship is generally entered into voluntarily and on apparently equal terms".

Maknanya media dan khalayak saling berhubungkait, khalayak mampu dikuasai oleh media dalam pelbagai cara berdasarkan kepentingan dalam penyampaian ideologi yang dikuasai. Dalam pengembangan media di Pakistan dalam beberapa tahun ini, pemerintah Pakistan telah memberikan kebebasan dalam pengembangan media yang dipunyai oleh pihak swasta, seperti radio FM 100 dan Shaheen Pay TV di tahun 1996.

Pengembangan media juga telah membawa daya saing kepada masyarakatnya untuk mengembangkan pelbagai program pada bidang

pendidikan, berita dan hiburan terhadap televisi pemerintah yang telah ada yaitu PTV. *The Pakistan Telecommunication Authority* juga telah melegalsasikan televisi kabel untuk pertama kalinya tahun 1999. Pakistan mempunyai dasar-dasar penyiaran yang dikenal dengan *The Pakistan Electronic Media Regulatory Authority* (PEMRA) yang mengatur tentang undang-undang penyiaran dalam bidang *broadcasting*. Beberapa prinsip yang berlaku di Pakistan sebagai aturan dalam penyiaran tersebut diantaranya :

- Mesti menghormati kedaulatan, keamanan dan integriti sebagai negara *the Islamic Republic of Pakistan*.
- Menghormati rasa kekitaan, budaya, sosial dan unsur-unsur agama yang terdapat dalam *the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan* dan tidak menayangkan program-program dan iklan yang membawa unsur-unsur keganasan, terorism, rasis, etnik, diskriminasi agama, sekte-sekte dan kebencian.

Menurut Aziz (2003) kebebasan media pada perusahaan swasta di Pakistan merupakan pengalaman baru, karena selama 56 tahun, media di Pakistan tidak banyak berkembang karena kuasa pemerintah terhadap media di Pakistan. Kini media telah mampu membawa perubahan terhadap *minda* masyarakatnya secara tepat, yang mana telah membolehkan masyarakatnya berpartisipasi dalam wacana-wacana kritis dan pelbagai pandangan serta opini yang dulu jarang terjadi.

Situasi media terkini di Pakistan telah didominasi oleh pihak pemerintah dan pihak swasta / *commercial*, PTV sebagai televisi yang dikendalikan oleh pemerintah di Pakistan peranannya menjadi besar dalam perluasan jaringan televisi, yang mana seterusnya ada impak besar terhadap penerimaan masyarakat dalam menggunakan televisi kabel dan parabola.

Ada tiga jenis *channels* televisi di Pakistan :

1. *State-owned TV channels*, yang seratus persen dikendalikan oleh pemerintah.
2. *Non PEMRA license*, yang tidak mengacu penayangan pada prinsip-prinsip PEMRA, seperti Geo, menayangkan program-program hiburan,

gaya hidup, musik, olah raga, film, dan dua penggunaan bahasa Sindhi dan Punjabi. Seperti AAJTV yang dasarnya adalah penayangan berita yang banyak mengalami perluasan menjadi penayangan berita-berita entertain.

3. *PEMRA license*, yang mempunyai link dari Pakistan, yang dasarnya adalah sebagai *commercial channels*.

Tabel 1.

The Perma licence holder private Tvchannels

No.	Name / Title of Licensee	Name of Channel
1	Virtual University, Lahore (has two channel)	Licence issued for VTV1 VTV2 VTV3 VTV4
2	Indus TV Network (Pvt) Ltd., Karachi (two channels)	Licence issued for Indus Music Indus Vision
3	AVT Prime Pvt.Ltd., Islamabad	Licence issued for Khyber TV
4	Ary Communications Pvt.Ltd. Karachi (two channels)	Licence issued for Ary One World Ary Digital
5	Mashriq Television Pvt.Ltd.,Lahore	Licence issued for Mashriq TV
6	International Marketing & Trading Company (Pvt.)Ltd.,Lahore	Licence issued
7	Top End Network Pvt.Ltd, Lahore	Licence issued
8	Eye TV Ltd.,Karachi	Hum TV
9	Vision Network TV Ltd., Karachi	Licence issued
10	24-Seven Media Network Pvt.Ltd, Karachi	Licence issued
11	Southern Networks Limited, Islamabad	Licence issued
	Number of Licences 16	Gone 'on air' 10

*www.pemra.gov.pk/licencing.htm

Tabel 1. ini memperlihatkan kemajuan negara dalam memainkan peran media di Pakistan. Kini PTV telah membolehkan masyarakatnya mengungkapkan pendapatnya dalam sebuah diskusi *live* dalam tayangan-tayangan program televisi yang ditayangkan. Sehingga dengan adanya kemajuan ini, hampir tiada kawalan terhadap *censorship*. Media, khususnya dalam *channel* televisi memegang peranan penting dalam memperkuat kejayaan proses demokrasi di Pakistan. Namun kepemilikan PTV tetap dikendalikan oleh pemerintah. Maka partai Junta sebagai partai utama yang paling berpengaruh di Pakistan mempunyai *control* terhadap media di Pakistan melalui PTV. Semua kandungan dan pengarahannya yang akan ditayangkan dalam media mesti dipilih terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum ditayangkan kepada khalayak, dalam hal ini masyarakat Pakistan. Ada juga beberapa *channels* yang tidak diresmikan secara legal oleh PEMRA, karena tidak diperbolehkannya kepemilikan media secara silang. Seperti *Geo channels*, *Apna channels*, *Uni Plus* dan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Mark Fishman, bahwa pemerintah menyediakan sumber terpercaya guna stabilitas penyampaian berita kepada khalayak, dalam hal ini khalayak di Pakistan.

Penelitian terhadap artikel ini, membawa kepelbagaian dan pluralism di televisi Pakistan. Namun yang terjadi di Pakistan sistem media yang terkasusan kepelbagaian dan pluralism tidaklah sesuai dengan kenyataannya, karena pada hasil survei masyarakat Pakistan tidak mempunyai pilihan atas *channel* yang diinginkan, karena adanya perkembangan isu politik dan konflik dalam proses demokrasi yang sedang berjalan di Pakistan, seterusnya pluralism tidak pernah terungkap secara nyata karena peran pemerintah masih sangat berpengaruh dalam media di Pakistan. Terdapat penekanan terhadap peran media dalam proses demokrasi di Pakistan, yang mana media mendapat tantangan yang harus mampu menjalankan perannya sebagai pengawas-memegang politik, pemerintah dan tentera *akuntabel* serta menjaga masyarakat umum agar mempunyai persepsi yang baik tentang pemerintah. Namun tidak jarang pula terdapat beberapa kasus didaerah konflik ini, tantangan sebagai jurnalis dalam menghadapi masalah keamanan yang pada gilirannya menghambat kemampuan

mereka untuk menyediakan informasi dan pencarian maklumat yang bebas. Sebagai contoh kasus, hanya enam jurnalis yang dalam menghimpun berita pada tahun 2009, Pakistan menjadi negara yang tidak mempunyai *future* untuk kerja jurnalis dan pegawai dalam dunia kerja media. (Report International Media Support, July 2009)

INDIA

Berbeda dengan perkembangan media di India yang telah menikmati kebebasan dalam mengeksplorasi industri media. Negara India sekarang sudah banyak mengalami perubahan, dari mulai dunia ICT nya yang berkembang, teknologi *engineering*-nya, sampai dengan film-film yang sangat mendapat banyak pemerhati dunia, yaitu *Bollywood*. India adalah negara perekonomian terbesar ke-4 dunia. Pada tahun 2034, India diprediksi akan menjadi negara dengan populasi terbanyak di dunia dengan jumlah penduduknya mencapai 1,6 milyar orang. Tahun 2007, 72.000.000 juta unit ponsel telah terjual di India. Tahun 1991 negara India telah melakukan pembelian 150.000 unit mobil, hingga pada akhir tahun 2007 meningkat menjadi 10.000.000 unit. Kini 29 % penduduk India mempunyai kecakapan dalam berbahasa Inggris, itu berarti sekitar 350.000.000 orang. India mempunyai kantor pos terbanyak di dunia. Sistem *railway* di India merupakan sistem *railway* terbesar di dunia yang dikuasai oleh satu perusahaan besar saja. Seorang tokoh ternama, Azis Premji, CEO perusahaan Wipro Industries adalah orang ketiga terkaya di dunia mengalahkan Sultan Brunei Darussalam, yang sekarang menempati posisi yang kini menempati posisi ke enam. (Fortune Magazine).

Doordarshan merupakan salah satu organisasi penyiaran terbesar di dunia dalam hal infrastruktur studio dan transmitter. NDTV (New Delhi Television Limited), dibangun pada tahun 1988, juga merupakan rumah produksi televisi terbesar di India.

Doordarshan	NDTV (New Delhi Television Limited)
▪ DD India,	▪ NDTV India
▪ DD National;	▪ NDTV 24X7
▪ DD1; DD NF;	▪ NDTV Imagine
▪ DD Sports;	▪ NDTV Good Times
▪ DD News	▪ NDTV Lumiere
	▪ NDTV Showbiz

All India Radio (AIR) dan *Doordarshan (DD)*, yang benar-benar dibawah kendali pemerintah, sekarang telah diatur oleh sesebuah perusahaan independen dari orang-orang terkemuka yang merupakan Bharati Prasar. Doordarshan mempunyai media konglomerasi kumpulan seperti DD News, DD Metro, DD Olahraga, Bharati dan yang lainnya. Beberapa kelompok utama Zee, Star, Sony, Sahara, Aaj Tak, NDTV, Sun TV, Raj TV dan Jaya TV. Selain itu juga terdapat *channel* film, olah raga, berita, kartun dan anak-anak khusus program, alam dan agama. Pada media radio, RadioMirchi dan Radio City merupakan kepemilikan swasta dan AIR FM merupakan kepemilikan pemerintah.

Dalam artikel Media Asia ini, India sebagai negara multi budaya dan bahasa dengan segala kepelbagaianya merupakan kajian yang sangat menarik dalam *culture studies*. Namun juga sangat penting dalam memahami beberapa prinsip dalam media di India.

Dasar-dasar yang menjamin kepelbagaian di India, dijelaskan dalam *the Constitutional guarantee for pluralism in India* diantaranya :

1. Keadilan sosial, ekonomi dan politik.
2. Kebebasan berfikir dan mengungkapkan pendapat, kepercayaan
3. Kescimbangan dalam status dan kesempatan untuk berkreasi
4. Penyatuan identitas terhadap kepelbagaian

Berasaskan prinsip-prinsip tersebut, televisi di India pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959, mendapat jaminan dari UNESCO dan bantuan dari Amerika Serikat dalam pendiriannya pertama kali, tujuannya adalah untuk pendidikan dan pengembangan negara. (Rao, 1998) India mempunyai kawalan, regulasi dan wewenang dalam sebuah program tayangan di media. Seorang wanita bernama Jai Chandiram, seorang *Deputy Director of Doordarshan and the President of the International Association of Women in Radio and Television* di India, mengungkapkan bahwa kemajuan media sangat diperlukan sebagai *watchdog* bagi negara yang menganut demokrat, sehingga media di India mempunyai masa depan yang cemerlang diantara kepelbagaian.

Kesimpulan

Jelas terdapat perbedaan yang mendasar dalam sistem media di Pakistan dan India. Walaupun kedua-dua negara merupakan negara *commonwealth*. Tetapi mempunyai sistem pemerintah yang berbeda dasar. Seperti halnya di Pakistan sebagai negara demokrasi parlemen yang berasaskan hukum Islam, walau sudah mengalami kemajuan namun masih mendapat pengendalian dari pihak pemerintah, yang dipegang oleh satu media televisi yang paling berpengaruh dan dipengaruhi oleh partai pemerintah yang mendominasi yaitu PTV. Berbeda dengan India yang telah mengalami kemajuan dibidang ICT sehingga kawalan terhadap media oleh pemerintah tidak lagi terlihat dan banyak konglomerasi media terjadi di India.

Daftar Pustaka

- Aziz, M.Y. 2003. *Development of Electronic Media in Pakistan. Prospects and Promotion of Electronic in Pakistan.* PEMRA.
- Fortune Magazine, July 2009. <http://money.cnn.com/magazines/fortune/>, Report International Media Support.

Sundeep,R. 2007. India. *Media Asia*. Vol.34 (3&4)

Zia, A&Elahi, M. 2007. Pakistan. *Media Asia*. Vol.34 (3&4)